

**ARAB SPRING:
PERUBAHAN REZIM DAN TEGANGAN HUBUNGAN AS – DUNIA ARAB
REFLEKSI SOSIO-HISTORIS**

Herdi Sahrasad

Abstract

The revolutions in the Arab World such as Egypt, Tunisia, Marocco, Libya, Syria and Yemen have affected political landscapes in the Middle East countries. Revolutions in the MENA countries have broken up relations between the Arab World and the US. The revolutions also have paved the way for Islamic groups to put political pressures to take power. Moreover, the Arab Spring have the influence over changes in the United States foreign policy in Middle East.

But, up to now, it is not clear that the revolution in the Middle East in 2011 is a great opportunity for the U.S. to increase its role in countries. It's not clear too, whether or not it also a new opportunity for the U.S. to establish strategic alliances in Arabic World.

While Washington was surprised by the fall of the regimes of Egypt and Tunisia, for instance, there is uncertainty that the two countries would be the new alliances of the US in the near future.

America has lost its loyalists such as former Egyptian President Hosni Mubarak and Ben Ali, Tunis. But at the same time, the proximity of the the US-Gulf alliances is increasing, especially with Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and Qatar. Washington for a while is still groping, if not frenzy, in rebuilding the present relationship with the Middle East, as long as the MENA countries are still in the era of transition. The U.S and the West are aware about that problem, and they understand that in the Middle East the political uncertainty is so apparently.

الملخص

أثرت الثورات في العالم العربي (مثل مصر، وتونس، والمغرب، وليبيا، وسوريا، واليمن) في الملامح السياسية في دول الشرق الأوسط. لقد كسرت هذه الثورات العلاقة بين العالم العربي والولايات المتحدة، ومهدت الجماعات الإسلامية الطريق إلى وضع الضغوط السياسية للتمسك بالسلطة. علاوة على ذلك أثر الربيع العربي في تغيير مسار سياسات الولايات المتحدة الخارجية تجاه الشرق الأوسط.

ولكنه لم يتضح حتى الآن أن الثورات في الشرق الأوسط هي فرصة كبيرة للولايات المتحدة لتنمية أدوارها في المنطقة، وأنها فرصة جديدة لتأسيس إستراتيجية التحالف مع العالم العربي. بينما فاجأت واشنطن بسقوط النظام في مصر وتونس، هناك شكوك بأن هاتين الدولتين ستصبحان حليفين جديدين للولايات المتحدة في مستقبل قريب.

فقدت الولايات المتحدة بعض مخلصيها مثل الرئيس المصري حسنى مبارك، والرئيس التونسي بن على. إلا أنه في الوقت نفسه ارتفعت قرابة التحالف بين الولايات المتحدة ودول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر. ولم تزل واشنطن لفترة تتلمس الطريق في إعادة بناء العلاقة الراهنة مع دول الشرق الأوسط طالما تظل هذه الدول في الفترة الانتقالية. لقد اطلعت الولايات المتحدة والغرب على هذه المشكلة، وفهموا أن القلق السياسي في الشرق الأوسط ظاهري فقط.

Revolusi demokrasi di Dunia Arab menimbulkan harapan bahwa masyarakat kawasan itu akan berubah menjadi *civil Islam*, suatu masyarakat sipil yang beradab, moderat dan demokratis, sebagai alternatif terhadap Islamisme militan atau radikal yang selama ini dipandang dan dipersepsikan sebagai kekuatan antidemokrasi dan penganjur kekerasan. Islamisme militan atau radikal relatif erat atau lekat dengan otoritarianisme dan totalitarianisme yang bertentangan dengan demokrasi modern.¹

Dunia Arab mengalami pergolakan politik yang dahsyat dan tak terbayangkan sebelumnya. Meski para akademisi semula khawatir bahwa revolusi ini diwarnai paradoks, rawan dan rentan untuk bisa mewujudkan perubahan, namun dunia internasional akhirnya menyaksikan revolusi itu mampu mengubah rezim yang berkuasa, melalui transisi demokrasi yang mendebarkan.²

Pergolakan politik di Tunisia Januari 2011 yang kemudian menyebar ke Mesir, Libya, Jordania, Maroko, Bahrain, Yaman,

Suriah dan sebagainya telah mengejutkan para akademisi dan menguncang fondasi sosial, politik dan intelektual mengenai Timur Tengah. Revolusi demokrasi di Dunia Arab itu begitu mengejutkan dan menyentak AS dan Barat.³

Peran internet sangat krusial dalam revolusi Arab itu sehingga para akademisi menyebut Arab Spring adalah revolusi digital awal abad ini. Internet memasuki Tunisia pada tahun 1991 dan Tunisia merupakan negara Arab pertama yang mendayagunakan teknologi internet setelah Presiden Zine ElAbidine Ben Ali berkuasa. Dan Tunisia pula yang menjadi negeri Arab pertama yang mengalami revolusi digital di Dunia Arab.⁴

Arab Spring atau Musim Semi Arab merupakan gelombang revolusioner yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang semula diawali pada Sabtu, 18 Desember 2010, di Tunisia. Muhammad Bouazizi, sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan formal lalu menjual buah-buahan dan sayuran di pasar. Polisi menganggap itu pelanggaran peraturan sehingga mengusirnya dan menyita barang dagangannya.

Frustrasi karena kehilangan tempat dan barang dagangannya, ia membakar diri sebagai protes terhadap tindakan polisi.

¹ Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, New Haven & London: Yale University Press, 2012, terutama bab 8 “Islamism and Totalitarianism” (halaman 201-224) dan bab 9 “Civil Islam as an Alternative to Islamism” (halaman 225-242)

² Asef Bayat, “*Paradoxes of Arab Revo-lutions*”, esai, www.jadalliya.com, diakses pukul 23.00 pada 1 Oktober 2012.. Tulisan jurnalisme politik ini merupakan kajian atas laporan media massa Januari 2011 sampai September 2012 antara lain *The Economist*, *Reuters*, *Kompas*, *Detikcom*, *Republika*, *The Guardian*, *commonground*, *Antara*, *AFP*, *AP*, *Inilah.com*, *Suara Pembaruan*, *Rimanews.com*, dan *Jawa Pos* ditunjang dengan kajian-kajian di berbagai jurnal dan kepustakaan.

³ Kenneth M. Pollack, “Understanding the Arab Awakening”, dalam *the Arab Awakening, America and The Transformation of the Middle East*, A Saban Center at the Brookings Institution, Washington, Brookings Institution, 2011

⁴ Julian York, *The Arab Digital Vanguard*, How a Decade of Blogging Contributed to a Year of Revolution, *Georgetown Journal of International Affairs*, Winter Spring 2012, Vol. XIII Number 1, halaman 33-42.

Aksinya menciptakan solidaritas mayoritas rakyat Tunisia, yang kemudian bangkit menentang pemerintah yang represif dan korup. Tidak sampai di situ, api Bouazizi pun menjalar di banyak negara Arab hingga menumbangkan beberapa diktator Arab, termasuk Presiden Tunisia Zein El-Abidin Ben Ali.

Revolusi Arab ini menyapu Tunisia, Mesir, Libya yang mengakibatkan jatuhnya pemerintah setempat, kemudian mencetuskan pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, dan Oman; dan protes kecil di Lebanon, Mauritania, Saudi Arabi, Sudan, dan Sahara Barat. Bentrokan di perbatasan Israel pada Mei 2011 dan gerakan Palestina juga terinspirasi oleh musim semi Arab. Protes mengikuti teknik perlawanan sipil dalam kampanye berkelanjutan yang melibatkan pemogokan, demonstrasi, pawai, dan demonstrasi, serta penggunaan media sosial untuk mengatur, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran dalam menghadapi upaya negara pada sensor, represi, dan internet. Banyak demonstrasi menghadapi kekerasan dari pihak berwenang, serta dari milisi pro-pemerintah dan kontra-demonstran. Slogan utama para demonstran di dunia Arab adalah *Ash-shab yurid isqat an-nizham* ("orang-orang ingin menurunkan rezim").⁵

Setelah berhari-hari demonstrasi massa di Mesir, menyusul tersingkirnya Zine el-Abidine Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak akhirnya mundur. Bagaimana gambaran ringkas situasi Arab Spring di Mesir sebelum revolusi 25 Januari 2011? Antara 1990 dan 2010, pemerintah Mesir mengambil serangkaian tindakan untuk memotong pengeluaran untuk menghadapi beban utang eksternal. Konsekuensinya mengerikan bagi penduduk miskin karena

⁵ Smith Alhadar, 'Arab Spring dan Implikasinya di Dunia', makalah disampaikan pada Seminar Reformasi Politik Timur Tengah dan Masa Depan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Islam As-Syafiiyah (15 Februari 2012)

mereka yang berpenghasilan rendah menjadi kian banyak yang menderita, sedangkan kebijakan itu justru memperkaya elit bisnis yang terus tumbuh, meski hanya segelintir elite.

Kaum muda terdidik semakin tertinggal, terpisah dari lingkup kekuasaan politik, ekonomi dan sosial para elite. Maka, mereka mulai membuat web berbasis kelompok. Pada saat yang sama, tiadanya pemilu yang demokratis, menimbulkan kemarahan di kalangan kelompok-kelompok oposisi.

Kaum pekerja di Mesir merupakan salah satu kelompok pro-revolusi yang menjatuhkan Mubarak. Para pekerja bukanlah kelas menengah, mereka mencakup tenaga berkeahlian dan buruh yang tak berketrampilan. Berbicara tentang kelas buruh bukanlah hal tabu di Mesir. Gaji bulanan buruh tekstil Mesir secara tipikal, dan banyak pekerja hanya meraih 2 dolar per hari, dan mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan.⁶

Menurut World Bank, 44 persen rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga revolusi Nil adalah revolusi oleh kaum miskin. Pendidikan bagi keluarga pekerja juga buruk karena sistem pendidikan/system sekolah tidak berjalan baik, sehingga setiap orang mengangkat tutor untuk anak-anak mereka. Akibatnya banyak orang ngutang untuk menanggung kebutuhan pokok keluarga mereka. Sementara itu harga pangan terus meroket selama beberapa bulan selama 2010-2011, menjadi problem ekonomi yang akut selama 20 tahun terakhir era Mubarak.⁷

⁶ Joel Beinin, *Where Does Democracy Come From? Popular Uprising and Parliamentary Elections in Egypt*, ceramah untuk seminar, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington, 5 Maret 2011, dimana penulis ambil bagian dalam seminar tersebut. Lihat juga Joel Beinin, *A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt*, situs School of Humanities, Stanford University, diakses pada 3 Maret 2011 pukul 22.00. Joel Beinin is the Donald J. McLachlan professor of history and professor of Middle Eastern history at Stanford University, USA

⁷ Joel Beinin, *Where Does Democracy Come From? Popular Uprising and Parliamentary Elections in*

Situasi ini menjadi bahan bakar Revolusi Nil yang digerakkan kaum muda, didukung kaum pekerja, para aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang marah atas korupsi, kediktatoran dan penindasan.

Mereka mulai menunjukkan aksi bersama di Tahrir Square untuk menyuarakan tuntutan mereka, dan cepat bergabung dengan kaum profesional dan intelektual dalam aksi revolusi 25 Januari 2011 yang mendesak Hosni Mubarak mundur.

Di tengah demonstrasi Tahrir Square, Kairo, misalnya, sempat terdapat dua skenario dapat terungkap: jalur cepat pemilu diselenggarakan, yang akan mendukung kelompok mapan seperti NDP (Partai Demokrasi Nasional) dan Ikhwanul Muslimin, atau "Tiga anggota dewan kepresidenan terdiri dari dua warga sipil dan seorang tokoh militer dan pembentukan baru kabinet yang terdiri dari teknokrat tidak berafiliasi dengan salah satu partai ", yang sudah diatur untuk melakukan pemilihan dan penyusunan konstitusi baru.

Setelah beberapa upaya untuk menegaskan kembali otoritasnya terbukti gagal, Mubarak akhirnya dipaksa mundur, tatkala angkatan bersenjata pun menyatakan dukungan mereka terhadap para demonstran. Pembelotan para jenderal senior di Tunisia dan Mesir membawa kejatuhan presiden mereka. Tidak semuanya berjalan baik, para jenderal kadang saling bermusuhan, dimana komando tertinggi angkatan bersenjata terbelah dan terbagi-bagi, seperti di Yaman, telah terjadi kebuntuan antara kubu pendukung dan penentang Presiden Ali Abdullah Saleh, yang masih dalam

pemulihan di sebuah rumah sakit Saudi akibat luka-luka yang diderita dalam serangan terhadap istananya di San'a. Situasi politik acapkali mengalami komplikasi karena perbedaan kepentingan dan pertarungan kekuasaan.

Michael Scott Doran, pakar politik internasional dari Timur Tengah, membandingkan revolusi yang terjadi di dunia Arab dengan kekacauan yang mengguncang penguasa Arab setengah abad yang lalu, setelah krisis Suez pada tahun 1956.

Kurun 1950-an itu Gamal Abdel Nasser, pemimpin Mesir muda dan karismatik, muncul sebagai pemenang setelah nasionalisasi Terusan Suez melawan kepentingan Prancis dan Inggris. Konflik berkembang di luar perbatasan Mesir dan menghasilkan revolusi Arab pertama. Ancamannya adalah eksternal, diwujudkan oleh negara-negara imperialis dan perang melawan Israel.

Gejolak dewasa ini merupakan revolusi Arab kedua. Ini merupakan pemberontakan populer, tapi kali ini melawan penguasa sendiri yang korup, yang bersekutu dengan Washington, yang dipandang sebagai "penerus kekaisaran" Inggris. Kaum muda Mesir telah menciptakan "blok perlawanan" untuk menghadapi rezim Mubarak dukungan Amerika Serikat dan melemahkan kekuatan mereka, dengan darah yang tumpah ruah di jalanan.

Namun runtuhnya rezim otoriter di Dunia Arab tak berarti akhir dari perjalanan revolusi. Sebaliknya, runtuhnya rezim otoriter justru menjadi awal dari sejumlah perjuangan berat yang harus dihadapi oleh kekuatan revolusi: disintegrasi. Ini terjadi karena runtuhnya rezim otoriter tidak hanya berarti kemenangan dan kebebasan bagi para pemuda pejuang revolusi, tetapi juga berarti kebebasan dan kemenangan bagi semua pihak, mulai dari pemuda pejuang revolusi hingga kelompok agamis yang dikekang pada masa kekuasaan sang diktator. Yang saat ini terjadi di

Egypt, ceramah untuk conference, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington, 5 Maret 2011. Lihat juga Joel Beinin, *A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt*, situs School of Humanities, Stanford University, diakses pada 3 Maret 2011 pukul 22.00. Joel Beinin is the Donald J. McLachlan professor of history and professor of Middle Eastern history at Stanford University, USA.

Mesir, misalnya, bisa dijadikan contoh paling baru mengenai kemenangan yang dialami kelompok agamais yang dipaksa tiarap pada masa rezim otoriter Mubarak. Setelah kekuasaan Mubarak berakhir, kelompok agamais di Mesir—salafi dan Ikhwan Muslimin—mendapat kebebasan mewujudkan cita-cita perjuangan mereka. Kedua kelompok agamais di Mesir itu berhasil memenangi pemilu legislatif secara mutlak.⁸

Washington telah mendefinisikan proses perdamaian Arab-Israel sebagai prioritas utama dan telah menunjukkan kesediaan untuk bertindak sebagai broker dan seorang negosiator. Blok resistensi hari ini mungkin tidak sekuat Nasser adalah pada tahun 1950, tapi Obama harus menyadari bahwa hal itu dapat bekerja melawan kepentingan Amerika.

Shadi Hamid, Direktur Riset di Brookings Doha Center dan Fellow di Pusat Saban untuk Kebijakan Timur Tengah di Brookings Institution, menyoroti tantangan berikutnya untuk agenda AS di Timur Tengah. Menurutnya, setelah revolusi Arab, kelompok-kelompok Islam pasti akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam pemerintah mereka baik untuk domestik maupun kebijakan internasional. Sejauh ini, seruan utama mereka telah menjadi sentimen anti-Israel dan kritik dari sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat. Dan sangat mungkin bahwa sejumlah kekuatan garis keras dari organisasi-organisasi Islam akan muncul dan mencoba untuk menjadi mitra pemerintah.

Meskipun demikian, kelompok arus utama yang semuanya berasal dari Ikhwanul Muslimin Mesir telah terbukti lebih "fleksibel" dan "pragmatis" dari yang diduga ketika kelangsungan hidup mereka telah dipertaruhkan. Seperti saran pemerintahan Obama, kelompok-kelompok Islam telah mendukung gerakan pro-demokrasi, tetapi pihak yang terakhir

ini juga berpendapat bahwa Washington telah menjadi sekutu lama dari rezim otokratis di wilayah tersebut.

Washington harus mulai memikirkan pendekatan jangka panjang baru dan dialog baru dengan kelompok-kelompok Islam pada berbagai isu internasional agar mereka tetap hadir di wilayah ini. Presiden Mesir terpilih, Mohammad Mursi PhD, tokoh Ikhwanul Muslimin yang meraih Doktor dari universitas di AS, masih bisa diajak dialog oleh AS/Barat, meski tetap memegang prinsip yang kuat dan teguh.

Tentu saja, negara-negara yang mengalami revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara itu mendapat perbaikan indeks demokrasi. Apakah revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara (Arab Spring) telah melahirkan gelombang demokratisasi jilid keempat (the fourth wave), seperti yang disitir sejumlah pengamat Barat, dimana gelombang demokrasi ini ditandai mencolok dengan kuatnya peran teknologi informasi (internet: google, facebook, twitter).

Setelah setahun berlalu, rupanya masih menjadi tanda tanya bagaimana prospek Arab Spring itu. Meski demikian, Arab Spring telah mengubah wajah kawasan jantung Islam itu. Ada dua perubahan yang terlihat nyata: kawasan itu menjadi lebih demokratis, sekaligus memberi kemenangan kepada kekuatan Islam legendaris yang justru pernah direpresi oleh para despot. Bahwa kawasan—yang selama tiga kali terjangan gelombang demokratisasi bak terlupakan—tersebut kini menjadi lebih demokratis, salah satunya dibuktikan laporan Indeks Demokrasi 2011 yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU).

Menurut lembaga riset yang didirikan Economist Group—yang antara lain menerbitkan majalah *The Economist*—itu, beberapa negara yang dilanda 'musim semi' mengalami peningkatan indeks demokrasi secara cukup signifikan, seperti yang dialami Tunisia, Mesir, Maroko, dan

⁸Hasibullah Satrawi, Setahun Musim Semi Arab, *Kompas*, Sabtu, 04 Februari 2012

Libya. Tunisia, misalnya, mengalami kenaikan indeks hampir tiga digit. Total skor Tunisia pada laporan Indeks Demokrasi 2010 lalu adalah 2,79, dan berada di ranking ke-145. Pada 2011, skor Tunisia melonjak menjadi 5,53, dan naik ke peringkat ke-92. Meski skor tersebut masih masuk kategori rezim hibrida (hybrid regime), negara di tanduk Afrika yang pernah dipimpin rezim Zine Al Abidin Ben Ali selama 23 tahun, itu, merupakan negara yang paling tinggi mengalami kenaikan skor pada 2011, dibanding 167 negara yang diriset oleh EIU (lihat infografis hlm 24-25). Mesir bahkan melompat dari kategori rezim otoriter (authoritarian regimes) menjadi hybrid regimes.⁹

Bekas negara Fir'aun —yang selama tiga dekade diurus oleh Husni Mubarak— tersebut diberi skor 3,95 oleh EIU pada indeks demokrasi 2011, dan menempati peringkat ke-115. Pada laporan serupa tahun sebelumnya, negara ini hanya mendapat skor 3,07 dan berada di peringkat ke-138. Libya juga naik peringkat. Pada 2010, negara tersebut terperosok di peringkat ke-158, dengan skor 1,94. Pada 2011, negara yang selama empat dekade dipimpin oleh Muammar Khadafi tersebut, naik ke peringkat ke-125, dengan total skor 3,55. Meski demikian, karena skornya masih rendah, negara ini masih masuk kategori negaranegara yang dipimpin rezim otoriter. Maroko juga mencatatkan kenaikan skor, dari 3,79 pada 2010, menjadi 3,83 pada 2011. Semua itu baru indikasi positif, namun jalan masih jauh dan berliku untuk mencapai stabilitas dan konsolidasi demokrasi di Dunia Arab. Dalam kaitan ini, tewasnya mantan penguasa Libya, Moammar Khadafi, Kamis (20/10/2011), dan jatuhnya Abdulah Saleh di Yaman memperpanjang daftar pemimpin Arab yang tersingkir akibat gelombang revolusi, atau sering disebut pula Musim Semi Arab (Arab Spring).

Pergolakan Libya

Lain lagi Di Libya, dimana Dr Abdulmonem Hresha menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tindakan dan kekejian rezim Moammar Gadhafi-karya. Hresha mengatakan benih oposisi sudah tumbuh sejak ia berusia 10 tahun. Meledaknya revolusi di Libya sekarang ini, sesungguhnya suah memiliki akar yang panjang.

Hresha dan teman sekelasnya dibawa untuk menyaksikan eksekusi lawan politik Gadhafi di depan rakyat. Anak-anak sekolah dibawa oleh aparat pemerintah untuk menyaksikan langsung, bagaimana Gadhafi melaksanakan eksekusi terhadap para penentangannya.

Hresha, yang mengajar fisika di Universitas Tripoli, kemudian melarikan diri ke Kanada. Sejak Gadhafi memburunya, karena dituduh menghasut rakyat Libya, dan memusuhi rezim yang tangannya sudah berlumuran darah. Selama di Kanada, Hresha itu terus bergelut di dunia pendidikan, dan mengajar Islam dan menyebarkan dakwah, di tempatnya yang baru. Kemudian, sejak Gadhafi mengambil alih kekuasaan, dan melaksanakan revolusi dengan "buku hijau" yang menjadi prinsip dasar negara Libya, yang sesungguhnya berisi ajaran Sosialisme, dan memusuhi dan memerangi kaum Islamis, dan memburu mereka seperti binatang.

Banyak tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin sekarang tinggal di London, dan mereka terus menata gerakan mereka dari London. Mereka para tokoh Ikhwan Libya yang tinggal di London, bekerjasama dengan para tokoh Ikhwan lainnya membangun komunikasi yang sangat intens, dan sekarang mereka mengantisipasi berusaha menjadi pemain penting pasca-Gadhafi. Sekarang Ikhwan yang masih ada di Libya mempunyai peranan dalam pergolakan politik untuk menggulingkan Gadhafi.

Ikhwanul Muslimin seperti di Mesir dan Tunisia, dan di Libya telah diberi energi oleh pergolakan yang melanda

⁹ Laporan *Economist* Group, London, 2011

dunia Arab. Gerakan Ikhwan yang sudah tertanam dalam kehidupan rakyat, khususnya diberbagai dunia Arab dan Afrika Utaara, sekarang mengambil lperanan yang penting dalam setiap pergolakan politik di setiap negara, dan gerakan yang mula-mula "tertutup" itu, kini bangkit dengan energi yang baru, dan ikut terlibata aktif dalam pergolakan yang berlangsung diseluruh dunia Arab dan Afrika Utara.

Sheikh Yusuf Qardawi yang pernah langsung berinteraksi langsung dengan Gerakan Ikhwanul Muslimin itu, mengatakan, meskipun ia sekarang tidak memiliki hubungan organisasi dengan Ikhwanul secara struktural, tetapi ia mengaku memberikan saham nilai-nilai (Islam) yang menjadi dasar dari gerakan Islam IKhwanul Muslimin, yang memiliki ingin membangun kembali Pan-Islamisme di Mesir pada tahun 1928.

Bahwa sebagian besar anggota Ikhwan di Libya direkrut menjadi anggota dari kelas menengah yang taat, mereka memiliki berpendidikan yang baik, mereka mengenyam pendidik di kampus universitas di Tripoli dan Benghazi. Kelompok Ikhwanul Muslimin mulai tumbuh dan berdiri di Libya sejak pertengahan 1950-an.

Kekuatan oposisi Islam yang berhadap-hadapan melawan rezim Libya, mulai menjadi sebuah kekuatan yang riil mulai di akhir 1980-an. Gerakan Ikhwan itu merupakan bagian dari munculnya dari "Sahwa" atau kebangkitan Islam yang lebih luas di Libya adalah sebagai reaksi terhadap perilaku politik Gadhafi yang terus-menerus menghancurkan Islam di Libya itu dengan mengangkat dan menjadi ideologi sosialisme sebagai ideologi negara, yang sangat bertentangan dengan Islam. Gadhafi menafsirkan ajaran Islam dengan kaca pandang sosialisme. Gadhafi seorang pengagum Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, yang kemudian menjadi sekutu utamanya.

Sebelumnya, memang muncul kelompok-kelompok jihadis yang

menggalang kampanye menggulingkan Gadhafi dengan jihad, tapi gagal pada 1990-an. Kemudian, Gadhafi melancarkan pembersihan terhadap kelompok-kelompok jihad di Libya dengan tangan besi.

Saat situasi yang sangat kritis luar biasa itu, Gerakan Ikhwanul terfukos pada pembentukan dan pembinaan kader secara tertutup, melalui taklim-taklim dan halaqo-halaqoh dan menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam jiwa rakyat Libya. Kelompok Ikhwan lebih banyak bergerak dibidang pendidikan dan sosial yang memberikan pelayanan kepada rakyat Libya.

Tetapi, tetap saja rezim Gadhafi dapat menangkap adanya sinyal-sinyal di kalangan masyarakat dengan munculnya "shahwah" Islamiyah yang terus memperlihatkan geliatnya. Maka, tahun 1998, aparat keamanan Gadhafi's melancarkan tindakan keras terhadap Ikhwan, dan kemudian melakukan penangkapan besar-besaran. Waktu itu, aparat keamanan Gadhafi menakgap lebih 200 anggota Ikhwan, dan dimasukkan ke dalam penjara dan ratusan lainnya, mereka dipaksa meninggalkan negaranya ke pengasingan, termasuk Hresha.

Meskipun, waktu itu menghadapi represi yang sangat hebat dari aparat keamanan Gadhafi yang menggunakan aparat intelijen, justru Ikhwan tumbuh dengan sangat subur, dan berhasil merekrut ribuan anggota, ujar Hresha. Sekarang benih yang di tanamkan sejak tahun 1980 an itu, menyebar di seluruh Libya, dan tidak ada kota di Libya yang tidak memiliki anggota atau kader Ikhwan. Bahkan di Sirte, yang merupakan tempat kelahiran dan kampung halaman Gadhafi tumbuh kader-kader Ikhwan. Ini hanyalah menunjukkan bagaimana kemampuan Ikhwan menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun, tetap bisa berkembang dan eksis secara baik.

Sesudah menghadap saat-saat yang sulit dari rezim Gadhafi, pada tahun 2006, para pemimpin Ikhwan dibebaskan oleh rezim Gadhafi menghadapi situasi yang

semakin krisis di dalam negeri, dan mencoba mendekati Ikhwan untuk memperkuat kekuasaan.

Tetapi, sekarang Ikhwan yang telah mengalami pengalaman sejarah yang pahit selama kekuasaan Gadhafi yang secara sistematis menghancurkan Islam dan Gerakan Islam, Ikhwan menghadapi situasi yang sekarang ini, Ikhwan bersama-sama dengan kekuatan oposisi. Bahu-membahu menghadapi rezim Gadhafi yang sudah uzur itu. Banyak kader Ikhwan yang sekarang ini terjun langsung bersama kekuatan oposisi untuk berperang melawan pasukan rezim Gadhafi.

Februari, di mana angin gerakan protes mulai bertiup di Libya, dan Sheik Yusuf al-Qaradhawi-seorang ulama terkemuka Mesir, yang kini menetap di Qatar, dan memiliki pandangan yang sangat luas, dan menjadi pembimbing dan pengarah nilai-nilai Ikhwanul Muslimin - mengeluarkan fatwa yang mewajibkan setiap prajurit Libya yang memiliki kesempatan untuk melakukannya untuk membunuh Presiden Gadhafi.

Para tokoh Ikhwanul Muslim yang hidup di pengasingan kembali Libya untuk bekerja dan membantu rakyat Libya yang menjadi korban serangan Gadhafi. Mereka bukan hanya ikut berjihad, tetapi mereka juga bekerja di rumah-rumah sakit, dan membantu mengobati orang-orang yang terluka akibat serangan militer rezim Gadhafi.

Mesir, Tunis dan Libya: Sebuah Refleksi

Kesaksian Lisa Anderson, pakar Timur Tengah dari AS di Kairo, menyebutkan bahwa orang-orang Mesir saling melindungi dan menjaga satu sama lain selama revolusi berlangsung. Baik untuk menjaga dan melindungi jiwa sesama warga maupun harta benda dari penjarahan dan pencurian oleh para criminal maupun narapidana yang lari keluar dari penjara.

Lisa Anderson bersaksi bahwa cerita penting mengenai revolusi Arab

2011 di Tunisia, Mesir dan Libya bukanlah tentang bagaimana globalisasi norma norma keterlibatan masyarakat warga dalam membentuk aspirasi para pemrotes, juga bukan tentang bagaimana kaum aktivis menggunakan teknologi untuk bertukar gagasan dan taktik pergerakan: melainkan bagaimana isu kritis itu disampaikan dan mengapa ambisi mereka dan teknik-teknik gerakan beresonansi dalam berbagai konteks local (Tunis, Mesir dan Libya), sementara pola dan demografi protes itu beraneka ragam, menyebar. Misalnya, demonstrasi di Tunis dimulai dari kawasan pedesaan yang terabaikan dan peripheral, kemudian secara spiral menyusut wilayah ibukota, disambut gerakan buruh yang sudah lama ditindas, mampu menumbangkan Ben Ali. Sementara di Mesir, sebaliknya justru kaum urban dan kosmopolitan menjadi penggerak utama pemberontakan dan perubahan. Dan di Libya, kelompok bersenjata di provinsi bagian timur menginisiasi aksi protes, mencetuskan perang antarsuku, tribalisme, dan memasuki ibukota Libya untuk melawan Khadafy yang akhirnya jatuh dan tewas. Seluruh gerakan itu mendesak tanggung jawab pemerintah dan menghendaki martabat manusia ditegakkan, seperti pandangan Lisa Anderson berikut ini:

“Instead, the critical issue is how and why these ambitions and techniques resonated in their various local contexts. The patterns and demographics of the protests varied widely. The demonstrations in Tunisia spiraled toward the capital from the neglected rural areas, finding common cause with a once powerful but much repressed labor movement. In Egypt, by contrast, urbane and cosmopolitan young people in the major cities organized the uprisings. Meanwhile, in Libya, ragtag bands of armed rebels in the eastern provinces ignited the protests, revealing the tribal and regional cleavages that have beset the country for decades. Although they shared a common call for personal

dignity and responsive government, the revolutions across these three countries reflected divergent economic grievances and social dynamics — legacies of their diverse encounters with modern Europe and decades under unique regimes.'¹⁰

Lisa Anderson, pakar Timur Tengah sekaligus Presiden American University di Kairo, menyoroti perbedaan antara Mesir, Tunisia dan Libya dan alasan mengapa tiga negara mengalami musim semi Arab. Tantangan di Tunisia, Mesir dan Libya akan memerlukan pendekatan yang berbeda. Di Tunisia, isu utama adalah kesenjangan sosial; di Mesir, itu adalah tidak adanya lembaga kuat selain dari militer dan Libya akan harus memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perang sipil.¹¹

Di Tunisia, penduduk berpendidikan tinggi masih banyak yang menganggur dan ekonomi amat bergantung pada besar daripada di Mesir, negara tetangga. Namun, tidak adanya kebebasan berbicara, tiadanya oposisi politik dan meluasnya kronisme dan korupsi besar-besaran oleh keluarga mantan Presiden Ben Ali, membuat rakyatnya marah dan memicu protes. Gerakan-gerakan kaum muda berolak sangat cepat, dan dengan demikian spontan dan tidak terorganisir dengan baik. Bertentangan dengan Mesir dan Libya, militer Tunisia tidak memainkan peran utama dalam pemberontakan tersebut. Hal ini disebabkan pengaruh mereka terbatas sebelum protes. Militer tidak memiliki ikatan dengan kekuatan ekonomi dan selalu kurang menonjol dibandingkan jasa keamanan kelompok Ben Ali. Tantangan yang ada di depan untuk Tunisia adalah

menciptakan sebuah sistem yang "mendorong debat politik terbuka" dan memperhitungkan tuntutan gerakan buruh/pekerja dalam pengambilan kebijakan.

Situasi Mesir sangat berbeda. Protes dipicu oleh ketidakmampuan Hosni Mubarak dan pemerintahnya untuk memberikan layanan dasar seperti pangan, pendidikan dan lapangan kerja untuk penduduk Mesir. Sektor publik hampir tidak ada atau berkubang dalam kesulitan. Gerakan raku yang populer, disiplin, terorganisir dan tanpa kekerasan mampu menjebol tembok kekuasaan. Tidak seperti di Tunisia, tentara Mesir selalu kuat. Sejak perjanjian perdamaian 1979 dengan Yerusalem, telah bekerja sama dengan Amerika-Serikat. Hal ini dihormati oleh masyarakat tetapi militer juga terkait dengan kegiatan ekonomi. Ada alasan untuk optimis "untuk membangun dan mempertahankan sebuah masyarakat terbuka.

Di Libya, masa depan tampaknya tidak begitu cerah dan bunga-bunga musim semi Arab belum mekar. Protes telah menyulut perang saudara berdarah, menimbulkan perpecahan antar daerah berbasis marga di dalam negeri. Setelah beberapa dekade rezim yang kejam dan korup, Muammar al-Qaddafi telah menciptakan kecurigaan di kalangan warga Libya yang telah memilih kelompok dan klan tertentu untuk jaringan keamanan dan untuk menyediakan mereka dengan kebutuhan dasar mereka. Protes telah mencerminkan perlawanan organisasi masyarakat di daerah, tidak terkoordinasi dan penuh kekerasan.

Tunisia, Mesir dan Libya telah mengalami pemberontakan populer simultan disebabkan oleh ketidakpuasan dan frustrasi. Gelombang revolusi itu telah banyak dipimpin oleh gerakan muda. Meskipun demikian, perbedaan di ketiga kawasan itu tidak harus dibuang. Tidak ada "Revolusi Arab yang tunggal", melainkan bahwa yang terjadi adalah

¹⁰Lihat, Lisa Anderson, "Demystifying Arab Spring" , Foreign Affairs (edisi Mei-Juni 2011). Uraian selanjutnya dari pandangan Lisa Anderson ini .Lisa Anderson, "Assessing the Arab Spring: A Cairo Perspective" Summer Institute, AUC, 28 Juli, 2011.

¹¹Lisa Anderson, "Demystifying Arab Spring" , Foreign Affairs (edisi Mei-Juni 2011). Uraian selanjutnya dari pandangan Lisa Anderson ini .

munculnya berbagai gerakan rakyat, konteks sosial dan situasi politik.

Adakah Perubahan?

Dunia internasional mencatat bahwa Revolusi Arab (Arab Spring) menjadi masif sejak bulan Januari 2011. Setelah satu-dua tahun telah berlalu adakah perubahan yang mendasar terjadi di Timur Tengah?

Pergolakan ini berawal dari Tunisia, meluas ke Mesir hingga akhirnya melanda sebagian besar dunia Muslim. Setelah setahun, perubahan rezim hanya terjadi di Libya, sementara di Mesir dan Tunisia, para penguasanya mungkin berganti, namun rezim lama sebenarnya masih tetap berkuasa. Penyebabnya adalah korupsi, kebusukan politik, kediktatoran dan campur tangan kekuatan asing terutama Amerika. Amerika memanipulasi perubahan di Timur Tengah dengan tujuan menciptakan Timur Tengah Raya baru. Dimana kekuatan lama Eropa memiliki pengaruh yang kecil.

Penjungkalan Zine El Abidine Ben Ali bukanlah peristiwa yang terjadi secara acak. Namun merupakan sintesis dari korupsi yang merajalela selama 23 tahun di bawah perlindungan Barat. Hal ini diperburuk krisis keuangan global dan program-program struktural penghisap darah IMF. Amerika bersemangat menunggu gejolak yang sama di Aljazair, Yordania, dan negara-negara Teluk. Mereka berharap bisa mengontrol rezim-rezim itu untuk memberikan kesetiaan kepada Amerika Serikat, setelah sebelumnya negara-negara itu lebih banyak berkorban untuk Inggris dan Perancis.

Dalam konteks Mesir, maka Amerika menjinakkan pemberontakan dengan membuang agen-agen yang setia pada Mubarak. Berikutnya menyerahkan kekuasaan kepada militer untuk memerintah Mesir. Perjanjian Terusan Suez dan Pakta bersama Mesir dengan Israel tetap berlaku sehingga banyak mengecewakan masyarakat Mesir. Saat ini Amerika secara terbuka membangkitkan

kembali ambisinya untuk menguasai Dunia Arab, sesuatu yang dahulunya dianggap terlampau ambisius dan berbahaya dibicarakan secara terbuka.

Partai Ikhwanul Muslimin dan partai An Nur mendapatkan kemenangan telak. Namun agenda mereka tampaknya tidak akan berbeda dengan para pendahulunya. Walaupun Ikhwanul Muslimin adalah kelompok politik terbesar di Mesir dan kekuatan yang luar biasa, mereka justru menempatkan diri pada posisi yang lemah. Mereka menunjukkan diri bahwa mereka tidak benar-benar menyerukan kepada Islam. Berusaha menenangkan kekhawatiran dunia Barat terhadap Islam di Mesir. Ikhwanul Muslimin menyatakan siap masuk ke dalam pemerintahan dan berkoalisi dengan partai-partai lain. Hilary Clinton mengatakan pemerintahan Obama akan melanjutkan pendekatan dengan melakukan kontak-kontak terbatas dengan Ikhwanul Muslimin yang sudah dilakukan selama sekitar lima atau enam tahun.

Partai Nour tidak berbeda. Juru bicara partai al-Nour dari Salafi, Yousri Hammad dalam sebuah wawancara telepon dengan saluran satelit independen al-Nas menyatakan kesiapan partainya untuk mempertahankan hubungan Mesir dengan Israel. "Mesir adalah penandatanganan perjanjian-perjanjian internasional dan hal ini harus dihormati. Ini bukan pendapat pribadi saya atau pendapat dari ketua partai, ini adalah bagian dari kebijakan partai." ujarnya.

Di Suriah, Bashar Al-Assad terus melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri, sementara masyarakat internasional hanya menonton. Respon masyarakat internasional sebagian besar hanyalah retorika. Disaat banyak yang menyerukan pemecatan Assad, Amerika malah menyerukan rezim Assad untuk melakukan reformasi.

Suriah kerap digambarkan sebagai negara yang tidak memperdulikan aturan-aturan internasional dan mendukung militan Hizbullah dan Palestina. Namun, yang luput dari pengawasan umum adalah

bahwa pemerintah Amerika selalu memandang Suriah sebagai wakil Amerika yang penting yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Suriah telah menjaga kepentingan-kepentingan Amerika, diantaranya tindakan penangkapan dan penyiksaan terhadap rakyatnya sendiri.

Di Irak, Suriah memainkan peran aktif dalam menginfiltrasi kaum Islamis dan memberikan informasi intelijen berharga kepada pasukan koalisi pimpinan AS. Termasuk kepada Pasukan Penangkis Suriah (SDF) di Lebanon yang menjamin perlindungan kepentingan-kepentingan Amerika dibawah Perjanjian Taif tahun 1989.

Amerika telah mendorong oposisi Suriah untuk memelihara dialog dengan rezim Bashar al-Assad. Mempersiapkan road map reformasi dengan tetap mempertahankan Assad. Hilary Clinton menjelaskan sikap Amerika dalam wawancara dengan media Italia Di Mezz'Orta (mei 2011) : "Yang kami tahu adalah bahwa mereka (rezim Assad) masih memiliki kesempatan melakukan agenda reformasi. Tak seorang pun percaya Qaddafi akan melakukan hal itu. Orang percaya ada kemungkinan jalan ke depan bagi Suriah..Jadi kami akan terus bergabung dengan semua sekutu kami untuk terus untuk menekankan dengan sangat keras pada masalah itu."

Amerika mencoba menjaga Assad tetap berkuasa, namun sekaligus mendukung pihak oposisi. Sebagai persiapan jika rezim Assad gagal mempertahankan kekuasaannya. Oposisi Suriah secara terbuka mencari intervensi internasional. Dalam pertemuan di Antalya, Turki, pada Juni 2011 oposisi Suriah berkumpul meminta Barat untuk membantu Suriah seperti yang dilakukan di Libya. Amerika juga menyerukan pihak oposisi bersatu sehingga dewan penguasa baru dapat terbentuk. Selanjutnya Amerika akan berhubungan dengan dewan penguasa baru ini, seperti Dewan Transisi Nasional di Libya.

Setelah menggulingkan Gaddafi, Dewan Transisi Nasional (NTC) telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai satu-satunya wakil rakyat Libya. Meskipun kenyataannya tidak diakui oleh banyak kelompok. Komentar-komentar baik dari London maupun Paris sejak jatuhnya Tripoli tentang pentingnya keberadaan pasukan penjaga perdamaian di sana adalah sebuah tanda yang buruk. Intervensi Barat akan tetap berlangsung.

Sampai akhir 2012, Libya tidak memiliki tentara sepenuhnya mapan. Libya masih belum memiliki otoritas politik yang tersentralisasi pasca jatuhnya Gaddafi. Negara itu masih berjuang untuk pulih dari perang panjang melawan Gaddafi selama berbulan-bulan. Baik NTC dan maupun pemerintahan transisi yang terbentuk pada November 2011 belum benar-benar berkuasa. Kekuasaan masih berada di tangan milisi bersenjata. Tak satupun yang bisa mewakili kekuatan militer nasional. Masyarakat internasional telah lama memandang NTC sebagai embrio negara Libya di masa depan.

Namun, pada saat ini NTC melihat tantangan yang paling dasar dari pembentukan negara adalah membangun keamanan internal. Terutama membentuk Tentara Nasional Libya .Namun sejauh ini semua upaya untuk mengancam milisi agar tunduk tidak menunjukkan hasil apa-apa. Sehubungan dengan Libya harus diingat bahwa Amerika memandang ketidakstabilan di Libya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengaruh di negara tersebut.

Berbeda dengan Libia, ketika Ben Ali digulingkan, beberapa pihak terus melakukan kontak dengan Prancis dan Inggris. Kelompok politik ini berusaha untuk menunda pemilihan umum. Dalam pandangan mereka situasinya belum tepat dan pada kenyataannya mereka akan mengumpulkan sangat sedikit suara. Namun pemilu akhirnya tetap berlangsung. Ketika pemilu berlangsung Oktober 2011, pemilu itu hanya untuk memilih sebuah majelis

konstituante. Majelis baru ini memiliki 217 anggota. Hanya 50% dari pemilih yang memberikan suara. Ennahdah sendiri mendapatkan 38% dari total suara.

Dalam usahanya yang menenangkan kekhawatiran Barat, Ketua Partai Ennahdah, Rachid Ghannouchi, menjelaskan penolakannya dengan pendirian Khilafah: "Tentu, kami adalah negara bangsa. Kami menginginkan sebuah negara untuk reformasi Tunisia, untuk Negara Tunisia. Adapun isu Khilafah, hal merupakan sebuah isu yang tidak ada dalam kenyataan. Realitas saat ini adalah bahwa kami adalah Negara Tunisia yang menginginkan reformasi, sehingga menjadi sebuah negara untuk rakyat Tunisia, bukan untuk melawan mereka." Ghannouchi menjadi pendukung jangka panjang reformasi Islam dalam meniru model pemerintahan Turki

Di Yaman, Setelah tekanan yang intens dan terjadi perdebatan politik, Salah menyetujui kesepakatan GCC pada akhir November 2011. Salah akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Abdrabuh Mansur Hadi, wakil presiden Yaman. Salah berusaha menegosiasikan transfer kekuasaan dengan pihak oposisi sebagai imbalan janji kekebalan dari penuntutan.

Meskipun Saleh akan secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden dan pemilu akan berlangsung pada bulan Februari 2012, transisi politik di Yaman sama sekali bukan merupakan perubahan rezim. Kesepakatan itu memberikan Saleh mundur dengan bermartabat. Tapi orang harus bertanya mengapa Saleh menyetujui kesepakatan itu setelah menolak untuk menandatangani perjanjian yang sama pada berbagai kesempatan sebelumnya? Tampaknya Saleh sudah mempersiapkan diri dengan mewariskan rezim yang tetap dibawah kontrol keluarganya.

Pasca Rezim Saleh, rezim itu penuh dengan anggota keluarganya. Anaknya Ahmed Ali Saleh, masih tetap memiliki kontrol atas angkatan bersenjata. Perjuangan di Yaman akan terus berlanjut karena Saleh berupaya untuk mendikte

kebijakan Yaman dari balik layar. Meskipun secara resmi ia tidak lagi berkuasa. Yaman adalah contoh lain dimana pribadi mungkin telah berganti tetapi rezim tetap berkuasa. Hal ini membuat bangsa ini tetap tidak stabil.

Masalah terbesar dengan Yaman adalah perjuangan Anglo-Amerika yang sedang berlangsung. Sekretaris Luar Negeri Inggris Deputy Urusan Timur Tengah, Evan Louis ketika bertemu dengan Duta Besar Yaman di London pada tanggal 24 November 2009 menjelaskan mengenai situasi di Yaman: "Apa yang terjadi di Yaman adalah perpanjangan perang (proxy war)."

Amerika telah menggunakan perang melawan teror untuk melemahkan Ali Abdullah Saleh, dengan menuduh Yaman menjadi tempat berkembang bagi Al Qaeda. Ali Abdullah Saleh mencoba menenangkan Amerika dengan sejumlah jaminan keamanan. Saleh memberikan kesempatan bagi Amerika melakukan serangan pesawat tak berawak di negeri itu.

Para analis melihat, Revolusi Arab menantang tatanan dunia yang ada. Rakyat yang bangkit menggulingkan para penguasa mereka. Revolusi Arab masih bekerja menuju suatu kemajuan. Peran Islam dalam masyarakat dan pemerintahan akan meningkat. Partai-partai yang ingin melemahkan Islam akan melihat diri mereka sendiri tersisih.

Amerika dan dunia Barat akan harus bersaing dengan dunia Islam yang menjadi muda kembali. Dunia Islam membuktikan mampu mematahkan belenggu ketakutan, dengan menjatuhkan rezim represif dukungan Barat, untuk menentukan nasib mereka di tangan mereka sendiri. Yang pasti dunia Islam menginginkan perubahan, dan kini arus itu tak bisa dibendung lagi.

Dalam kaitan ini, Daniel Byman menunjukkan bagaimana Al Qaeda dan kelompok Islamis di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain, bereaksi terhadap revolusi Arab Spring di dunia Arab.

Komunikasi Al-Qaeda tidak fokus pada peristiwa dan Amerika Serikat telah menafsirkan ini sebagai tanda kemenangan kebebasan melawan terorisme.

Demokrasi dan kebebasan tidak pernah disukai kelompok-kelompok ekstremis, seperti Al Qaeda, yang tidak bisa lagi mengkritik Negara yang represif. Meskipun demikian, kelompok jihad ini akan terus berjuang menentang setiap rezim sekuler yang mungkin timbul. Revolusi Arab mungkin membuat AS dan Timur Tengah tidak menjadi lebih dekat dengan Washington sebagaimana sebelumnya, terutama Mesir yang dengan AS melakukan kerjasama penuh dalam perang melawan terorisme. Bangsa-bangsa di dunia Arab telah menyerukan demokrasi yang akan dilaksanakan. Tapi sejauh ini, tidak ada orientasi yang jelas telah muncul dari masa transisi. Situasi ini menyisakan ruang untuk kelompok-kelompok ekstremis untuk mendapatkan karingan dan faksi-faksi pendukungnya.

Amerika Serikat harus bergerak sebelum masa transisi berakhir: tidak menerima Islam di masa depan, dimana pemerintah bisa membuktikan adanya rencana untuk kontraterorisme. Tetapi menerima pata Islamis yang menang dalam pemilu di Timteng adalah resiko karena pandangan mereka tentang topik penting, seperti konflik Arab-Israel, adalah berlawanan. Washington harus membuat baik penggunaan media dalam memerangi Al Qaeda dan harus terus menekan mereka tanpa membiarkan mereka untuk mengeksploitasi posisi Amerika, baik sebagai pendukung rezim otokratis atau negara imperialis. Sebuah solusi yang masuk akal bagi mereka adalah dengan membuat koneksi dengan pasukan keamanan masa depan dan membangun kebijakan kerja sama dengan mereka.

Respon Presiden AS: Obama

Salah satu isu yang kini terus menjadi sorotan, bahkan menjadi polemik, adalah tentang peran asing, khususnya AS, di balik revolusi Arab itu. Tentu tidak bisa

dimungkiri dukungan kuat AS dan Barat terhadap revolusi Arab.

Presiden AS Barack Obama, misalnya, secara tegas meminta Presiden Hosni Mubarak mundur saat revolusi Mesir pada Februari. Obama kini juga meminta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur.

Andil AS dalam penumbangan rezim Khadafy di Libya tak kalah besar. AS tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk operasi militer bagi perlindungan warga sipil di Libya. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, AS mengerahkan pesawat tanpa awak, Predator, untuk memburu pasukan loyalis Khadafy.

Untuk Libya, Pemerintah AS segera mencairkan pula aset-aset Libya di AS yang sebelumnya dibekukan, yakni sebanyak 1,5 miliar dollar AS. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Tripoli, Selasa (18/10), juga berjanji akan menggelontorkan bantuan 40 juta dollar AS untuk mendukung program keamanan di Libya.

Di Suriah, AS memilih berada di belakang Turki untuk mendukung gerakan revolusi rakyat melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. AS berada di balik manuver-manuver oposisi Suriah yang sebagian besar bertitik tolak dari Turki. Pembentukan Dewan Transisi Nasional Suriah, misalnya, dideklarasikan di Istanbul, Turki, pada akhir September. Deklarasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari AS.

Meski demikian, manuver-manuver AS itu tetap belum menjamin terlindunginya kepentingan AS di Timur Tengah, seperti terjadi pada era kepemimpinan para rezim diktator.

AS dituntut harus mengubah kebijakan makro di Timur Tengah, terutama menyangkut isu Palestina, jika kepentingannya di kawasan itu tetap terpelihara. Kemarahan opini Arab terhadap AS sudah luar biasa. Ini adalah akibat dukungan tanpa batas AS terhadap Israel

sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948 hingga saat ini.

Keunggulan militer Israel secara mutlak hingga bisa memenangi semua perang melawan Arab hanya terjadi lantaran dukungan tanpa batas AS kepada Israel itu. AS kini lagi-lagi berusaha dengan segala cara untuk menghentikan program nuklir Iran agar Israel tetap memegang hegemoni dalam persenjataan nuklir di Timur Tengah.

Tercapainya transaksi Gilad Shalit pada 2011 antara Israel dan Hamas merupakan percikan kecil yang positif akibat perubahan sikap Israel ke arah yang lebih lunak. Transaksi tersebut adalah menukarkan serdadu Israel, Gilad Shalit, yang disekap Hamas sejak tahun 2006 dengan 1.027 tahanan Palestina. Tercapainya transaksi tersebut tentu tak lepas dari adanya perubahan situasi di kawasan akibat revolusi Arab.

Tuntutan berikutnya adalah kesediaan Israel untuk bersikap atau menjadi lebih lunak dalam perundingan damai dengan Palestina. Perundingan ini perlu untuk membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur.

Dalam hal ini, AS bisa berperan dengan menekan Israel demi terwujudnya negara Palestina tersebut. Dengan demikian, AS berharap kepentingan AS dan Israel di Timur Tengah tetap terjaga pascarevolusi Arab Spring.

Di Tunisia, ratusan warga turun ke jalan-jalan ibukota menuntut pemerintah tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel. Ketua komite penentangan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, Kahlaoui Ahmed menyatakan, "Mampuslah untuk orang-orang Tunisia yang mencoba untuk menormalkan hubungan dengan Israel."

Di Tunisia, para pejabat yang bertanggung jawab melakukan reformasi politik menyusul tergulingnya mantan presiden Zine El Abidine Ben Ali, meratifikasi "pakta republikan" yang bertujuan membentuk dasar sebuah

konstitusi baru. Para demonstran di Tunisia menyatakan tidak bisa lagi mempercayai pemerintah saat ini dan mengancam akan menggulingkan para pejabat yang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Berbagai elemen garis keras di Tunis, terutama Al-Nahda, merupakan partai Islam yang menginginkan Tunisia kembali menjadikan Islam sebagai rujukan penyelenggaraan negara. Partai Al-Nahda memiliki visi anti-Zionisme, yang berusaha meningkatkan peran masjid, menolak pemisahan agama dan negara serta mendukung dipertahankannya pendidikan dan budaya berorientasi Arab.

Pemerintah Tunisia dan Israel membuka seksi kepentingan pada 1996 namun kemudian Tunis memutuskan seluruh hubungan dengan Tel Aviv setelah dimulainya intifada kedua pada 2000.

Di Tunisia, ratusan warga turun ke jalan-jalan ibukota menuntut pemerintah tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel. Ketua komite penentangan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, Kahlaoui Ahmed menyatakan, "Mampuslah untuk orang-orang Tunisia yang mencoba untuk menormalkan hubungan dengan Israel."

Di Tunisia, para pejabat yang bertanggung jawab melakukan reformasi politik menyusul tergulingnya mantan presiden Zine El Abidine Ben Ali, meratifikasi "pakta republikan" yang bertujuan membentuk dasar sebuah konstitusi baru. Para demonstran di Tunisia menyatakan tidak bisa lagi mempercayai pemerintah saat ini dan mengancam akan menggulingkan para pejabat yang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Berbagai elemen garis keras di Tunis, terutama Al-Nahda, merupakan partai Islam yang menginginkan Tunisia kembali menjadikan Islam sebagai rujukan penyelenggaraan negara. Partai Al-Nahda memiliki visi anti-Zionisme, yang berusaha meningkatkan peran masjid, menolak pemisahan agama dan negara

serta mendukung dipertahankannya pendidikan dan budaya berorientasi Arab.

Pemerintah Tunisia dan Israel membuka seksi kepentingan pada 1996 namun kemudian Tunis memutuskan seluruh hubungan dengan Tel Aviv setelah dimulainya intifada kedua pada 2000.

Sebagaimana Bernard Lewis mencatat bahwa ada kelompok pro-Amerika di bawah rezim anti-Amerika, dan ada kelompok anti-Amerika di bawah rezim pro-Amerika.

Sangat sedikit orang Arab percaya bahwa pandangan yang ada di sekeliling mereka adalah negara tirani, kemiskinan berkembang, perang lintas generasi antara ayah yang sekuler dan anak yang Islami-adalah akibat panen dari sejarah mereka sendiri. Tapi orang-orang Arab telah tergantung pada keyakinan mereka bahwa Amerika yang sengaja membuang nasib mereka. Mohammed Atta, yang memimpin sebagai pilot kematian dalam bom WTC 9/11, adalah anak dari kelas menengah Mesir, putra pengacara, yang terbentuk oleh kekecewaan Mesir dan ketidakadilan.¹²

Kemenangan Islamis di pemilu Mesir dan Tunisia menunjukkan bahwa ada satu hal yang tidak berubah di Musim Semi Arab – yakni perubahan itu sendiri. Di Arab Saudi sekalipun, di mana tuntutan akan reformasi tidak mencakup seruan akan pergantian rezim, perubahan terbukti tidak terelakkan seiring meninggalnya Putra Mahkota dan adanya berbagai pertanyaan tentang akan ke arah mana negara ini nantinya dibawa oleh putra mahkota yang segera akan ditunjuk.

Sangat sedikit orang Arab percaya bahwa pandangan yang ada di sekeliling mereka adalah negara tirani, kemiskinan berkembang, perang lintas generasi antara ayah yang sekuler dan anak yang Islami-adalah akibat panen dari sejarah mereka sendiri. Tapi orang-orang Arab telah tergantung pada keyakinan mereka bahwa Amerika yang sengaja

membuang nasib mereka. Mohammed Atta, yang memimpin sebagai pilot kematian dalam bom WTC 9/11, adalah anak dari kelas menengah Mesir, putra pengacara, yang terbentuk oleh kekecewaan Mesir dan ketidakadilan.¹³

Kemenangan Islamis dalam pemilu Mesir dan Tunisia, juga Maroko, menunjukkan bahwa ada satu hal yang tidak berubah di Musim Semi Arab – yakni perubahan itu sendiri.

Sementara itu, di Yaman, dalam mengampanyekan demokrasi yang tak bertentangan dengan ajaran Islam, telah menjadi modal dan peluang yang dilakukan Tawakul Karman (32). Langkah itulah yang kemudian memicu bangkitnya partai Islamis pada Pemilu terbaru Arab Spring di Tunisia. Kampanye 'Islam tidak mengancam demokrasi' membuat aktivis Yaman tersebut, meraih nobel perdamaian. "Semua agama menghormati demokrasi," ujar Karman saat menerima penghargaan di Oslo pada Desember 2011. Ia menerima penghargaan bersama dua wanita asal Liberia yaitu Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf dan Leymah Gbowee.

Kampanye Karman dinilai membawa pengaruh besar bagi kehidupan demokrasi di negara-negara Arab. Banyak partai Islam yang menjadi pemenang pada pemilihan umum (pemilu) 'Arab Spring' di tahun ini.

Pemilu pertama setelah 'Arab Spring' dilaksanakan di Tunisia. Partai Islam Ennahda dinyatakan sebagai pamanang dengan memperoleh 41 persen kursi. Kememangan atas partai Islam juga terjadi di Maroko. Kini, Ikhwanul Muslimin dinobatkan sebagai pemenang pada pemilu Mesir, dengan meraih lebih dari 50 persen suara. Karman mengatakan bahwa soal demokrasi sebenarnya dari interpretasi dan toleransi yang dibuat oleh pengikut mereka.

Satu-satunya masalah adalah kesalahpahaman dari pengikutnya, entah itu Islam, Kristen, Yahudi atau agama lain.

¹²Fouad Ajami, *From 9/11 To Arab Spring*, *Asian Wall Street Journal*, 8 September 2011

¹³Fouad Ajami, *From 9/11 To Arab Spring*, *Asian Wall Street Journal*, 8 September 2011

Mereka seolah mengatakan bahwa ini adalah agama.

Mendapatkan julukan "Ibu Revolusi", Karman berharap revolusi yang berlangsung di Yaman akan mengubah citra negaranya di luar negeri yang dianggap sebagai surga teroris.

"Sebelum revolusi, semua orang berbicara tentang terorisme dan Osama bin Laden. Tapi setelah revolusi, Anda akan melihat Yaman yang damai,"katanya.

Karman memainkan bagian penting dalam protes di Yaman yang meminta Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur beberapa bulan lalu. Nama, Karman mulai mencuat di Yaman setelah aktivis perdamaian ditahan tak lama di hari-hari awal revolusi. Dia menjadi tokoh kunci di antara aktivis sejak mereka mulai berkemah di Taghyir Square di pusat Sanaa menuntut berakhirnya kekuasaan keluarga Saleh selama tiga dekade.

Dengan kemenangan partai-partai Islam di Yaman, Tunis, Mesir dan Maroko, yang kini meraih perhatian dunia internasional, ada gejala bahwa partai yang berhaluan ke arah Islam moderat, justru mendapat tempat. Bahkan Partai Ikhwanul Muslimin, yang di era Hosni Mubarak selalu digambarkan sebagai kelompok militan, ternyata sangatlah moderat. Dalam kampanyenya, partai itu selalu menekankan tak ingin mendirikan negara Islam atau mengambil sikap bermusuhan dengan Barat. Yang menarik, kiblat partai-partai Islam Arab tersebut ternyata adalah ¹⁴Partai Keadilan (AKP) yang berkuasa di Turki. Partai pimpinan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ini memang merupakan partai berbasis Islam tapi sangat moderat.¹⁵

¹⁴Ahmad Arif, Belajar dari 'Arab Spring', *Serambi Indonesia*, Rabu, 21 Desember 2011

¹⁵ AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) memenangi pemilu 12 Juni 2011 lalu dengan suara mayoritas; melampaui jajak pendapat menjelang pemilu yang memprediksi AKP memperoleh 47% suara. Yang luar biasa, suara AKP terus naik dari 34,43% pada pemilu 2002, menjadi 46,47% pada pemilu 2007, lalu 49,85% pada pemilu 2011. Namun

Mengubah Peta Pengaruh AS?

Laporan media menyingkapkan bahwa terjadinya revolusi Arab di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, Libya, Suriah dan Yaman berpengaruh terhadap perubahan kembali

demikian, Erdogan tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lainnya. Menurut Prof. Azyumardi Azra (2011), kunci utamanya tidak lain adalah keberhasilan AKP melalui Perdana Menteri Erdogan, membangun ekonomi Turki setelah dua kali masa pemerintahannya. Karena itu, tak heran PM Erdogan kembali menang dalam pemilu tahun ini dengan 49,85% pemilih memberikan suara kepada AKP. Padahal, ketika mulai berkuasa pada 2002, PM Erdogan mewarisi Turki yang tengah ambruk secara ekonomi, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan menganga luas. Di tengah situasi memburuk itu, pertikaian dan konflik politik juga sangat mewarnai kehidupan publik Turki. PM Erdogan dengan AKP yang secara tersembunyi merupakan partai berorientasi Islam berhasil membalikkan keadaan. Pembalikan keadaan itu dilakukan berdasarkan prinsip Erdogan tentang 'demokrasi ke depan' (forward democracy) yang berisikan 'ekonomi yang kuat, pemerintahan yang kuat, dan partai yang kuat'. Berdasarkan kerangka ini, PM Erdogan menampilkan pemerintahan efektif dan efisien melalui transformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik daripada melayani diri sendiri. Hasilnya, ekonomi Turki tumbuh secara fenomenal. Pada 2011 ini, prediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 11 persen. Tetapi, perkembangan ekonomi yang mengagumkan itu bukan semata-mata demi pertumbuhan, tetapi untuk pemerataan dan keadilan. Pemerintahan Erdogan, misalnya, memberikan akses seluas-luasnya bagi kaum miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik; pemukiman kumuh digusur untuk digantikan perumahan publik masif dan dengan subsidi besar negara; infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kampung dibangun besar-besaran. Kedua, komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Ketika mengikuti pemilu 2002, AKP mengkampanyekan pemerintahan yang bersih, masyarakat tertarik dan berharap dengan janji itu. Pemerintahan korup selama 80 tahun sebelumnya menjadikan masyarakat tak percaya lagi kepada wajah-wajah lama dan menaruh harapan kepada AKP. Clean government yang dijanjikan itu diwujudkan selama pemerintahannya. Pemerintahan yang relatif bersih dari korupsi menjadikannya dipercaya kembali oleh rakyat dari periode ke periode.. Turki di bawah AKP yang dikomandani Erdogan adalah bukti negara muslim yang berhasil dalam reformasi politik dan ekonominya.

peta pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Benar bahwa revolusi di Timur Tengah pada 2011 merupakan kesempatan besar bagi AS untuk meningkatkan perannya di negara-negara yang haus akan demokrasi dan inovasi. Hal itu juga kesempatan baru bagi AS untuk membentuk strategi aliansi baru. Namun ketegangan antara AS dan Dunia Arab itu begitu nampak, sebab perubahan rezim telah memaksa Gedung Putih mengubah pula kebijakan luar negerinya ke Dunia Arab, tidak bisa mendiktekan kepentingannya secara arbitrer.

Tak diragukan, Washington terkejut dengan jatuhnya rezim Mesir dan Tunisia yang selama ini menjadi sekutu loyalisnya. Revolusi di Mesir dan Tunisia meledakkan hubungan antara kedua negara tersebut dengan AS. Selain itu, revolusi juga membuka jalan bagi kelompok-kelompok Islam yang selama ini ditekan pemerintah untuk memimpin negara tersebut di bawah tatapan curiga Barat. Meski demikian, hubungan antara AS dengan negara-negara Teluk Arab cukup baik. Negara-negara Teluk dan AS merupakan pasangan jiwa dalam membangun kebijakan luar negeri. Baik negara-negara Teluk maupun AS merasa khawatir dengan ambisi Iran untuk mengembangkan program nuklir.

Negara-negara Teluk menyediakan basis militer bagi AS, termasuk markas bagi kapal angkatan laut ke-5 AS di Bahrain. Hal ini merupakan bagian dari strategi Pentagon saat akan menarik pasukannya dari Irak tahun ini. Secara singkat, pengaruh AS di Timur Tengah mendapatkan pukulan dengan adanya Arab Spring. Namun pengaruh AS semakin bersinar di negara-negara Teluk.

Amerika telah kehilangan teman yang mudah diprediksi gerakannya seperti mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Namun pada waktu yang sama, kedekatan dengan aliansi Teluk semakin meningkat. Di sini memang ada perubahan bagi pengaruh AS.

Dipimpin oleh negara super kaya Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain dan Qatar,

para penguasa Teluk berupaya membangun pusat politik yang tertuju pada mereka. Serangan NATO di Libya melibatkan kontribusi pesawat tempur Qatar dan Uni Emirat Arab. Enam negara blok Teluk juga mendorong agar Presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri karena tuntutan para pengunjuk rasa. Begitu pula, mereka menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad agar mundur. Padahal, Rezim Suriah merupakan salah satu mitra paling penting Iran.¹⁶ Namun, rupanya para penguasa Teluk ingin perubahan berhenti di perbatasan mereka sendiri. Pada Maret lalu, pasukan keamanan yang dipimpin Saudi membantu tetangganya Bahrain, membela dinasti Sunni yang berusia 200 tahun agar tetap berdiri. Pasukan keamanan tersebut membela Bahrain dari para pengunjuk rasa pro-reformasi di negara pulau yang mayoritas Syiah itu.

Salah seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, Nicholas Burns, mengatakan tak ada satu pun yang kebal terhadap gelombang perubahan. AS akan terus menasehati agar negara-negara Teluk tetap berupaya melakukan reformasi.

Burns percaya, Arab Spring telah memberikan banyak pelajaran bagi para diplomat AS dalam hal kesabaran dan perspektif. Menurutnya, Arab Spring merupakan pengaruh dari peran AS selama bertahun-tahun, bahkan dekade.

Bagaimanapun, Dunia Arab telah berubah dan Amerika Serikat maupun pemerintah Barat lainnya harus menerima kenyataan bahwa Islam telah muncul untuk mengisi kekosongan kekuasaan di dunia Arab. Kekosongan kekuasaan ini muncul setelah gelombang pemberontakan rakyat yang kita kenal dengan Arab Spring.¹⁷

¹⁶ Kini Suriah mendekati kejatuhannya karena posisi Assad melemah akibat tekanan Eropa, AS, dan perlawanan rakyat dalam negeri, meski Iran dan Rusia masih berusaha membela penguasa Suriah. .*baca*, Duta Masyarakat, 29/1/2012

¹⁷ Herdi Sahrasad, "Pergolakan Timur Tengah", monograf, dipresentasikan untuk diskusi masalah

Human Rights Watch (HRW), Lembaga yang berbasis di New York, mendesak hal itu, pekan lalu. Sekaligus, mendesak partai-partai Islam, yang telah muncul sebagai pemenang terbesar dalam pemilihan terakhir di Tunisia dan Mesir dan di Libya, untuk menghormati hak-hak perempuan dan kaum minoritas agama. Mereka mengatakan pemerintah tidak bisa tebang pilih untuk urusan hak asasi manusia.¹⁸ Direktur eksekutif HRW, Kenneth Roth sempat memperingatkan jika partai-partai Islam yang populer di dunia Arab mengabaikan popularitas, tentu akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Menjadi pemerintah dengan politik Islam seharusnya tak menjadi alasan untuk mengubah menjadi pemerintahan yang tak tersentuh soal HAM.

Roth sangat berhati-hati ketika ditanya tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia di bawah kekuasaan Islam. Dia mengatakan bahwa sejauh ini, Islam telah melakukan banyak hal yang benar. Tetapi, pembuktian dapat terlihat ketika mereka berurusan penuh dengan hak asasi manusia dalam kekuasaannya nanti. Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab ummat Islam di Dunia Arab. Dalam beberapa hal, pemberontakan-pemberontakan di Arab yang tak terduga, menampar keras Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Barat lainnya. Selama ini Barat mendukung rezim-rezim otokratis sebagai benteng melawan Islam.

Sudah bertahun-tahun AS/Barat mendukung susunan otokrat selama mendukung kepentingan Barat. Namun kini dengan Arab Spring, nampaknya AS/Barat masih harus menyesuaikan diri dengan transformasi bersejarah di Dunia Arab yang tak berpreseden di mata AS/barat tersebut.

Washington untuk sementara masih meraba-raba, walaupun tidak kalang kabut, dalam membangun kembali kehadiran dan

relasinya dengan Timur Tengah yang masih dalam era transisi. AS/Barat memang menyadari bahwa dewasa ini, yang pasti di Timur Tengah adalah ketidakpastian itu sendiri.

Daftar Pustaka

Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, New Haven & London: Yale University Press, 2012, terutama bab 8 "Islamism and Totalitarianism" (halaman 201-224) dan bab 9 "Civil Islam as an Alternative to Islamism" (halaman 225-242)

Asef Bayat, "Paradoxes of Arab Reolutions", esai, www.jadalliya.com, diakses pukul 23.00 pada 1 Oktober 2012.

Kenneth M. Pollack, *Understanding the Arab Awakening*, dalam *the Arab Awakening, America and The Transformation of the Middle East*, A Saban Center at the Brookings Institution, Washington DC, Brookings Institution, 2011

Julian York, *The Arab Digital Vanguard, How a Decade of Blogging Contributed to a Year of Revolution*, *Georgetown Journal of International Affairs*, Winter Spring 2012, Vol, XIII Number 1, halaman 33-42.

Smith Alhadar, *Arab Spring dan Implikasinya di Dunia*, makalah disampaikan pada Seminar Reformasi Politik Timur Tengah dan Masa Depan Umat Islam, Universitas Islam As-Syafiiyah (15 Februari 2012)

Joel Beinin, *Where Does Democracy Come From? Popular Uprising and Parliamentary Elections in Egypt*,

Timur Tengah, *Madjid Politika*, Universitas Paramadina, 6 Agustus 2012.

¹⁸ Duta Masyarakat, 29/1/2012

- paper untuk seminar, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington, 5 Maret 2011
- Joel Beinin, *A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt*, situs School of Humanities, Stanford University, diakses pada 3 Maret 2011 pukul 22.00.
- Hasibullah Satrawi, Setahun Musim Semi Arab, *Kompas*, Sabtu, 04 Februari 2012
- Laporan Timur Tengah, *Economist* Group, London, 2011
- Lisa Anderson, "Demystifying Arab Spring", *Foreign Affairs* (edisi Mei-Juni 2011).
- Lisa Anderson ini .Lisa Anderson, "Assessing the Arab Spring: A Cairo Perspective" Summer Institute, AUC, Cairo, 28 Juli, 2011.
- Fouad Ajami, From 9/11 To Arab Spring, *Asian Wall Street Journal*, 8 September 2011
- Ahmad Arif, Belajar dari 'Arab Spring', *Serambi Indonesia*, Rabu, 21 Desember 2011
- Herdi Sahrasad, "Pergolakan Timur Tengah", monograf untuk diskusi masalah Timur Tengah, Madjid Politika, Universitas Paramadina., 6 Agustus 2012.
- Duta Masyarakat, koran, 29/1/2012
- Sumber penelitian dan kajian atas surat kabar, majalah dan media online Januari – Desember 2011 dan Januari-Agustus 2012:
- <http://www.economist.com>
- <http://www.reuters.com>
- <http://www.kompas.com>
- <http://www.detik.com>
- <http://www.republika.co.id>
- <http://www.guardian.co.uk>
- <http://www.commonground.com>
- <http://www.antara.com>
- <http://www.ap.org>
- <http://www.jawapos.com>
- <http://www.inilah.com>
- <http://www.rimanews.com>
- <http://www.suarapembaruan.com>